



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Agenda Permasalahan Tahun 2006

Masalah-Masalah Sosial di Indonesia: Pemahaman Konsep, Fokus Analisis, Skema Hubungan antar-variabel dan Metode Analisis
Doddy Sumbodo Singgih

Implementasi Kebijakan: Jaring Pengaman Sosial - Operasi Pasar Khusus Beras (JPS – OPKB) Keluarga Pra Sejahtera
Eko Supeno

Protes Sosial Buruh sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik
Kris Nugroho

Negara Madura: Sejarah Pembentukan hingga Penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Muryadi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya: Penyebab dan Kendala Penanganannya
Sudarso

Prospek Perbankan Syariah pada Masa Mendatang
Toto Warsoko Pikir

The Difficult but Interesting Problems of Clearly Conceptualizing Tourism and The Tourism Industry, and Differentiating The Two
Dian Yulie Reindrawati

Reformasi dan Pembangunan Lembaga: Melembagakan Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Rochyati Wahyuni Triana

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosuebrotu (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi : FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5012442

e-mail : fisip@unair.ac.id

Pengantar Redaksi

Memasuki tahun 2006 banyak sekali agenda permasalahan pemerintah yang harus segera diselesaikan sebagai akibat lanjutan dari tahun sebelumnya. Menurut catatan yang ada pada redaksi, permasalahan cukup menonjol yang dihadapi memasuki tahun 2006 meliputi berbagai aspek baik sosial, ekonomi, hukum, politik, keamanan, budaya.

Permasalahan yang dihadapi saat ini merupakan akumulasi buah kebijakan pemerintah yang sarat dengan berbagai kepentingan dan kontroversi. Sebut saja misalnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (dengan harapan subsidi BBM dapat mengalir kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan) ditengah keterpurukan ekonomi dan daya beli masyarakat, belum lagi ketidakjelasan status hukum pejabat korup yang dapat berkeliaran secara bebas, maraknya terorisme dan separatisme, banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anjal, masyarakat miskin dan terlantar, gelandangan dan pengemis, dan sebagainya.

Hendaknya pemerintah dapat arif dan bijaksana untuk mengurai satu per satu permasalahan yang ada, sebelum permasalahan yang lain dan lebih besar datang. Di mana pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan, keputusasaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Secara teoritik kumpulan artikel, dan hasil penelitian yang diulas dalam jurnal ini tidak lain adalah beberapa contoh permasalahan yang dihadapi pemerintah memasuki tahun 2006, selain terdapat berbagai tulisan di luar topik utama, antara lain: Masalah-Masalah Sosial di Indonesia: Pemahaman Konsep, Fokus Analisis, Skema Hubungan Antar-Variabel dan Metode Analisis disajikan Doddy Sumbodo Singgih; dari sisi kebijakan, tulisan Eko Supeno mengulas tentang Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial-Operasi Pasar Khusus Beras (JPS-OPKB) Keluarga Pra Sejahtera; Protes Sosial Buruh sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik oleh Kris Nugroho dari segi politis, kemudian wacana tentang Negara Madura: Sejarah Pembentukan hingga Penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Muryadi, sudut pandang sosial Sudarso mengupas tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya: Penyebab dan Kendala Penanganannya, secara ekonomi Prospek Perbankan Syariah pada Masa Mendatang oleh Toto Warsoko Pikir, dinamika pariwisata disampaikan oleh Dian Yulie Reindrawati tentang The Difficult but Interesting Problems of Clearly Conceptualizing Tourism and The Tourism Industry, and Differentiating The Two, kemudian permasalahan kelembagaan dijelaskan oleh Rochyati

Topik Utama Edisi No. 2 (April) 2006:
Pornografi dan pelayanan Publik

Wahyuni Triana mengenai Reformasi dan Pembangunan Lembaga: Melembagakan Tata Kepemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kehadiran Jurnal *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* pada tahun 2006 ini semoga dapat memberikan pencerahan sekaligus alternatif pemecahan masalah dan menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam menuangkan gagasan serta ide kreatif demi perbaikan proses pembangunan serta perbaikan masyarakat.

Redaksi

Wakil Pemimpin Redaksi
Permasalahan yang dihadapi saat ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah korupsi yang telah menjadi budaya yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, upaya untuk memerangi korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penegakan hukum, reformasi birokrasi, hingga peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, masalah lain yang perlu diperhatikan adalah masalah lingkungan hidup. Dengan semakin meningkatnya aktivitas industri dan pembangunan, dampak negatif terhadap lingkungan hidup juga semakin besar. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi lingkungan hidup harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Terakhir, masalah kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian yang serius. Dengan semakin meningkatnya angka penyakit menular dan non-menular, upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan akses layanan kesehatan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan diri.

1891/TTS/PPK/Reg/KS/148-04 NTT
ISSN 2502-6120
Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Volume 19, Nomor 1, Januari 2006
Penerbit: Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Masalah-masalah Sosial di Indonesia: Pemahaman Konsep, Fokus Analisis, Skema Hubungan antar-variabel dan Metode Analisis

Doddy Sumbodo Singgih

1

Implementasi Kebijakan: Jaring Pengaman Sosial - Operasi Pasar Khusus Beras (JPS – OPKB) Keluarga Pra Sejahtera

Eko Supeno

9

Protes Sosial Buruh Sebagai Alternatif Perumusan Kebijakan Publik

Kris Nugroho

23

Negara Madura: Sejarah Pembentukan hingga Penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Muryadi

35

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Surabaya: Penyebab dan Kendala Penanganannya

Sudarso

45

Prospek Perbankan Syariah pada Masa Mendatang

Toto Warsoko Pikir

59

The Difficult But Interesting Problems of Clearly Conceptualizing Tourism and The Tourism Industry, and Differentiating The Two

Dian Yulie Reindrawati

69

Reformasi dan Pembangunan Lembaga: Melembagakan Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Rochyati Wahyuni Triana

75

NEGARA MADURA Sejarah Pembentukan hingga Penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Muryadi

Dosen Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Unair, Surabaya

Abstract

The objective of recent research was to uncover history around the Madurese state formation and its integration into the Unitary State of Republic of Indonesia. Some sources used in the research covered a set of documents kept by East Java Archive Agency. From the research results it was found that first, the Dutch colonial government played a very significant role in the state formation. Second, the fear of "Javanization" constituted one of the causes for the local leaders to establish the Madurese state. Third, dissatisfaction toward the Madurese state formation is materialized in dissolution of Madurese state and forceful resignation of state officers who were anti the Unitary State of Republic of Indonesia.

Keywords: *Madurese state, federal, history*

Selama kurang lebih dari empat puluh tahun kita ditabukan membicarakan tentang konsep negara lain, selain dari negara kesatuan, padahal masih banyak alternatif lain selain itu, misalnya negara federal. Tidak ada yang sakral dalam politik sehingga tidak boleh dibicarakan, dikritik, diubah, dan diganti. Sistem politik adalah produk manusia, oleh karena itu ia dapat diubah dan diganti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian juga halnya dengan konsep negara. Di era keterbukaan yang dimulai dengan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden pada bulan Mei 1998, ditandai antara lain oleh kebebasan mengutarakan pendapat. Akibatnya muncul berbagai pandangan yang selama Orde Baru atau bahkan pada masa sebelumnya tidak boleh

dibicarakan. Salah satu diantaranya adalah masalah bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia perlu ditinjau kembali dengan mengkaji kembali kemungkinan-kemungkinan negara serikat (negara federal atau negara federasi). Negara kesatuan merupakan salah satu penyebab terjadinya manipulasi kekuasaan oleh penguasa sehingga merugikan daerah-daerah di Indonesia. Sebaliknya negara federal bisa merupakan salah satu alternatif untuk mencegah menumpuknya kekuasaan di tangan pemerintah pusat dan berkembangnya potensi daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing (Rauf, 1999:1).

Persoalan bentuk negara federasi, pada awal memasuki reformasi, kembali mencuat dan ditawarkan untuk dijadikan

alternatif dari bentuk negara kesatuan, yang ternyata tidak dapat mewujudkan cita-cita untuk hidup dan sejahtera bersama. Adanya ide untuk mencari alternatif bentuk negara itu, seharusnya tidak ditentang dengan alasan separatisme, disintegrasi, serta anti Pancasila, malah sebaliknya karena kembali kepada bentuk negara federasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kehendak separatisme. Bahkan sebaliknya, justru adalah usaha beralternatif untuk tetap mempertahankan kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara (Gonggong, 1999:5). Penelitian historis ini berusaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses dari pembentukan Negara Madura serta keterlibatan Belanda dalam pembentukan Negara Madura tersebut?
2. Bagaimanakah sikap dan reaksi masyarakat Madura terhadap pembentukan Negara Madura tersebut?
3. Bagaimanakah proses pembubaran dari Negara Madura tersebut untuk selanjutnya kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan mendiskripsikan mengenai sejarah pembentukan Negara Madura pada tahun 1948 hingga penyelesaiannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana baru bagi disiplin ilmu sejarah terutama dalam memahami sejarah ketatanegaraan Indonesia. Hal ini disebabkan karena topik yang dibahas dalam penelitian ini dalam buku-

buku sejarah hanya dibahas secara sambil lalu saja. Selama ini seingat peneliti masih sangat sedikit buku yang membahas mengenai negara-negara federal yang pernah mewarnai sejarah ketatanegaraan di Indonesia.

Salah satu hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia adalah bahwa Belanda mengakui Negara Indonesia berbentuk serikat. Hasil persetujuan dan kesepakatan dalam KMB adalah dibentuknya satu negara federal di Indonesia (Pusponegoro, 1992: 205). Negara federal baru itu diberi nama Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS sendiri terdiri dari negara-negara bagian, diantaranya adalah: Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur, Negara Madura, dan sembilan satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yakni: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Masing-masing negara bagian memiliki luas daerah dan jumlah penduduk yang berdeda.

Tulisan ini sama sekali bukan untuk mengurangi jiwa nasionalisme dari orang-orang Madura, tetapi justru menempatkan pada porsi yang sebenarnya. Sejarah tidak hanya mengupas yang manis-manis saja tetapi juga mengupas masalah-masalah yang kadang-kadang tidak dikehendaki oleh generasi sesudahnya, bukanlah sejarah yang benar adalah sejarah masa kini.

Tinjauan Pustaka

Menurut Wiryoprawiro, di daerah Madura kekuasaan Belanda dalam bidang

pemerintahan sudah demikian kuat, meskipun secara tidak langsung. Artinya penguasaan Belanda terhadap daerah Madura ini tidak langsung memerintah rakyat, tetapi dengan jalan menguasai dan memerintah para bangsawanya. Dengan demikian maka para adipati di Madura masih tetap memiliki kekuasaan atas rakyat dan daerahnya. Bahkan untuk sumber tenaga militer dalam rangka politik *divide et impera*, maka justru Belanda mengajarkan pada para adipati untuk mendirikan pasukan yang cukup kuat untuk menghadapi rakyat, namun tidak akan berani untuk menyerang Belanda (Wiryoprawiro, 1986: 41-42). Keperkasaan para sultan di Madura ini akhirnya justru dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung politik *divide et impera* dengan mengadu domba antar suku di Indonesia. Putra-putra Madura yang dikenal perkasa ini justru kemudian dihadapkan untuk memerangi dan menumpas perjuangan kemerdekaan saudara-saudaranya dari suku lain, misalnya dapat dilihat dalam Perang Diponegoro, Perang Bone, Perang Bali, Perang Borneo, dan Perang Paderi (Kuntowijoyo, 2002:144).

Irna Arnyla Djafaar (2005) dalam bukunya yang berjudul: *Dari Moloku Kie Raha hingga Negara Federal* banyak mengupas mengenai biografi salah seorang tokoh yang memiliki peranan besar dalam pembentukan Negara Indonesia Timur, Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah. Di dalam bukunya dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran Sultan tentang negara federal pada saat itu sesungguhnya bertolak dari realita kondisi wilayah Indonesia Bagian Timur, yang masyarakatnya terpecah-pecah pada beribu-ribu pulau. Pemikiran

federalisme ini juga dalam rangka mempercepat proses pembangunan wilayah-wilayah di Timur Indonesia yang sangat tertinggal.

Menurut Herbert Feith, pembentukan negara federal ini tidak berdasarkan landasan konsepsional. Menurut kenyataannya negara federal itu bermula dari usaha Belanda untuk menghancurkan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945. Sudah pasti pembentukannya ditentang oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia. Dalam pada itu ternyata di dalam lingkungan negara-negara bikinan Belanda pun terdapat gerakan *republikein* yang kuat yang berhasrat menegakkan kembali NKRI (Feith, dalam Dekker, 1980: 55). Buku lain yang membahas mengenai topik serupa, bahkan yang mengilhami penulis untuk meneliti masalah ini adalah buku seri penerbitan naskah sumber arsip yang berjudul: *Pembentukan Negara madura Tahun 1948 dan dampaknya Terhadap Republik*. Buku yang diterbitkan oleh Badan Arsip Propinsi Jawa Timur tahun 2002 ini ternyata lebih banyak menampilkan arsip-arsip yang membahas masalah tersebut tanpa banyak ulasan maupun analisa. Dengan demikian buku ini lebih banyak menulis ulang dokumen-dokumen arsip yang ada dan disusun secara kronologis. Meskipun begitu buku ini banyak membantu para penulis yang akan meneliti mengenai Negara Madura tanpa harus bersusah payah membuka arsip-arsip lama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Pada proses awal, selain pemilihan topik peneliti juga menyusun rencana

kegiatan penelitian, objek penelitian serta permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Penentuan pokok permasalahan sangat penting sebagai pijakan peneliti dalam menelusuri data dan sumber yang diperlukan. Pemilihan topik yang membahas mengenai sejarah pembentukan Negara Madura hingga penyelesaiannya dalam NKRI banyak diilhami ketika peneliti membaca buku kumpulan arsip yang membahas masalah serupa yang diterbitkan oleh Badan Arsip Propinsi Jawa Timur. Buku ini hanya berisi kumpulan arsip yang ditulis apa adanya sesuai dengan aslinya dan belum ditulis dalam bentuk tulisan sejarah. Dari sinilah maka peneliti tertarik untuk mengolah arsip sejarah ini menjadi tulisan sejarah. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan sumber sejarah. Tulisan ini kebanyakan menggunakan arsip-arsip sejarah yang telah dibukukan oleh Badan Arsip Propinsi Jawa Timur Seri Penerbitan Naskah arsip No. 2 yang diberi judul: *Pembentukan Negara Madura tahun 1948 dan Dampaknya Terhadap Republik*. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan sumber tangan kedua.

Tahap penelitian selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Agar penelitian ini lebih objektif, maka sumber yang terkumpul harus diuji otentitasnya, terutama menyangkut materi informasinya. Kritik sumber dilakukan dengan cara melakukan *cross check* terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh dan menganalisisnya. Dalam menganalisa sumber-sumber digunakan teori-teori atau konsep-konsep dan pendekatan ilmu sosial sebagai alat bantu. Tahap terakhir adalah tahap penulisan, di mana peneliti menyajikan hasil penelitian sejarah dalam bentuk tulisan sejarah yang

disusun secara kronologis (Kuntowijoyo, 1955:102).

Hasil dan Pembahasan

I. Kebijakan van Mook Membentuk Negara Bagian

Setelah Perjanjian Linggarjati secara resmi disepakati oleh pihak Indonesia dan Belanda yang pada waktu itu sedang berselisih, namun pada kenyataannya Belanda masih terus berusaha untuk melaksanakan politiknya untuk menguasai Indonesia. Pada suatu saat Belanda mengeluarkan interpretasi atas bunyi Perjanjian Linggarjati tersebut, yang sangat sukar diterima oleh Republik Indonesia. Menurut interpretasinya, sebelum Negara Indonesia Serikat terbentuk nanti pada tanggal 1 Januari 1949, maka harus dibentuk pemerintahan peralihan di Indonesia yang dikepalai oleh Wakil Tinggi Mahkota. Interpretasi ini ditulis dalam suatu nota yang kemudian disampaikan kepada pemerintah RI pada tanggal 27 Mei 1947. Nota ini ditolak oleh RI, sebab dirasa tidak sesuai dengan jiwa Perjanjian Linggarjati.

Sementara itu bangsa Indonesia pada saat yang bersamaan baru terjadi krisis kabinet di Yogyakarta dengan jatuhnya Kabinet Syahrir yang kemudian digantikan oleh Kabinet Amir Syarifuddin pada tanggal 3 Juli 1947. Kesempatan ini digunakan oleh van Mook pada tanggal 20 Juli 1947 untuk mengumumkan sikapnya dengan menyatakan bahwa Belanda tidak mau lagi berunding dan menyatakan tidak terikat lagi dengan isi Perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947 van Mook melancarkan agresi militer ke wilayah RI. Agresi ini dikenal dalam sejarah sebagai Agresi Militer Belanda I.

Agresi ini direncanakan oleh van Mook untuk melancarkan niatnya mendirikan negara-negara bagian di wilayah-wilayah hasil agresi itu. Negara bagian pertama yang diciptakan van Mook pada tanggal 24 Desember 1946 adalah Negara Indonesia Timur (NIT). Menurut Perjanjian Linggarjati NIT diakui sebagai negara tersendiri. NIT dipilih sebagai daerah tempat negara bagian pertama yang dibentuk dengan pertimbangan karena kekuatan militer Belanda di daerah ini relatif besar. Selain itu Belanda berpendapat bahwa gagasan negara federal akan mempunyai daya tarik tersendiri bagi rakyat di luar pulau Jawa, yang jumlahnya jauh lebih besar.

Pada salah satu kesempatan van Mook pernah mengemukakan perbedaan antara sistem uniterisme dan federalisme. Dalam sistem uniterisme biaya pemerintahan akan menjadi lebih murah daripada sistem federal, tetapi akan timbul bahaya bahwa satu bagian akan dapat menguasai bagian lainnya. Dalam keadaan demikian perpecahan mungkin akan timbul. Oleh karena itu sistem federal dalam susunan ketatanegaraan akan lebih baik, tetapi dengan suatu syarat bahwa bagian-bagian yang merupakan komponen dari federasi itu haruslah merupakan wilayah-wilayah yang luas dan memiliki potensi ekonomi, sosial, dan politik yang mantap. Menurutny sistem yang cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah sistem federal. NIT sebagai negara bagian pertama yang didirikan, menurutnya memiliki potensi yang sangat besar baik dari segi ekonomi maupun kebudayaan. Van Mook yakin bahwa NIT akan dapat menjelma menjadi suatu negara yang mempunyai daya hidup yang kuat dan akan dapat mengembangkan identitasnya

sendiri sehingga akan berhasil menjadi bagian yang berharga dari federasi Indonesia (Anak Agung, 1985:101).

Langkah van Mook ini kemudian dilanjutkan dengan mendirikan negara-negara bagian yang lainnya seperti: Negara Sumatera Timur, Negara Madura, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, dan Negara Jawa Timur. Di samping mendirikan negara-negara bagian ia juga membentuk daerah-daerah otonom seperti: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Dengan berhasilnya membentuk negara-negara bagian ini menandakan pula keberhasilan Belanda dalam menjalankan politik *divide et imperanya*.

2. Beban Sejarah dari Keinginan Membentuk Negara Madura

Dalam menjelaskan mengapa beberapa pemimpin lokal Madura seperti Cakraningrat memiliki keinginan untuk mendirikan Negara Madura yang terlepas dari negara RI yang berpusat di Jawa, sebenarnya dapat dijelaskan dalam hubungannya antara penguasa Madura dan Jawa (khususnya Mataram) pada masa kerajaan. Meskipun secara geografis wilayah Madura terpisah dengan Jawa, namun secara politis Madura pada jaman kerajaan selalu berada di bawah kerajaan-kerajaan besar di Jawa terutama Mataram. Madura pada waktu itu bukanlah sebagai wilayah yang bebas dari kekuasaan Jawa bahkan harus tunduk pada kekuasaannya.

Ketakutan terhadap dominasi Jawa ini rupanya menjadi beban sejarah yang terus teringat oleh para pemimpin lokal Madura, ketika ia harus memilih menurut

keinginan Belanda untuk memisahkan diri dengan membentuk negara sendiri terpisah dari RI atau memilih bergabung dengan RI sebagai negara kesatuan yang juga berpusat di Jawa. Dengan kata lain masalah Jawanisasi menjadi pertimbangan ketika mereka harus memutuskan untuk masalah ini. Konflik antara pemimpin di Madura dengan penguasa di Jawa pada masa kerajaan seringkali terjadi. Ketika wilayah Madura di kuasai oleh kerajaan Mataram, selain sebagai wilayah yang tidak bebas juga banyak dibebani oleh berbagai penyerahan dan pajak yang sangat tinggi. Beban penyerahan wajib tersebut tidak mustahil menjadi penyebab utama mengenai sikap penguasa Madura seperti Trunajaya, Cakraningrat II, Cakraningrat III, dan Cakraningrat IV untuk berusaha melepaskan diri dari kekuasaan yang ada di Jawa (Mataram) (Kasdi: 253-254).

Tindakan untuk memisahkan diri para penguasa Madura dari dominasi ikatan kerajaan Mataram itu tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi di pulau itu. Meskipun secara geografis hampir seluruh Madura terdiri dari tanah kapur sebagai bagian dari pegunungan kapur utara di bagian utara Jawa Timur, tetapi tampaknya pada awal abad ke-18 Madura merupakan pulau yang makmur. Hal ini terbukti di pulau ini terdapat tidak kurang dari lima kota yang kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya bila dibandingkan perkembangan beberapa kota di Jawa kondisinya tidak jauh berbeda.

Beban sejarah kedua yang memiliki pengaruh besar bagi beberapa pemimpin lokal Madura lebih tertarik untuk mengadakan kerjasama dengan Belanda dan mau untuk mendirikan negara sendiri dari pada bergabung dengan RI yang ada

di Jawa adalah hubungan yang sudah dilakukan keduanya selama itu. Dalam sejarah ketika mereka konflik dengan penguasa Jawa, maka pemimpin Madura akan memilih alternatif untuk minta bantuan Belanda. Kerjasama antara Belanda dengan pemimpin Madura salah satunya dapat dilihat pada organisasi militer yang dikenal dengan nama Barisan Madura. Organisasi barisan ini merupakan suatu pasukan militer yang keberadaannya diterima dengan adanya hubungan militer antara penguasa Madura dengan Belanda. Sejarah aliansi militer antara Madura dan Belanda dimulai pada tahun-tahun awal Belanda masuk ke Madura. Pada saat itu pula kebetulan kerajaan-kerajaan Madura sedang berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Mataram. Usaha ini mendapat respon positif dan perlindungan dari Belanda. Sebagai gantinya maka kekuatan-kekuatan militer Madura diminta untuk mendampingi Belanda selama menghadapi berbagai pemberontakan, seperti Perang Diponegoro, Perang Bone, Perang Paderi, Perang Bali, dan perang-perang lainnya (Kuntowijoyo, 1988:144).

Atas penghargaan dalam membantu perang ini maka pemerintah kolonial sering memberikan penghargaan kepada sultan dan keluarganya. Bahkan, karena sangat cintanya kepada Belanda beberapa sultan ketika meninggal dunia berwasiat agar jenazahnya ditutupi dengan bendera Belanda (Wiryoprawiro, 1986:29).

3. Pembentukan Negara Madura

Pada bulan Desember 1947 di Jakarta terbentuk Komite Indonesia Serikat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil negara bagian dan tokoh-tokoh politik termasuk di dalamnya wakil dari

Madura. Tugas utama dari komite ini adalah membentuk negara Indonesia Serikat. Oleh karena itu perwakilan yang hadir setelah pertemuan berakhir diberi tugas supaya merundingkan hal ini dengan rakyat di daerahnya masing-masing. Sebagai tindak lanjut dari keputusan ini maka pada tanggal 16 Januari 1948 di Madura berhasil didirikan Komite Penentuan Kedudukan Madura.

Pada tanggal 23 Januari 1948 diadakan pemungutan suara yang banyak mendapat tekanan dari Belanda. Cara yang dilakukan dalam pemungutan suara adalah di tiap-tiap desa terlebih dahulu akan diberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari pemungutan suara. Dari pelaksanaan pemungutan suara diperoleh hasil sebagai berikut:

Orang yang berhak memberikan suara:

305.546 orang

Orang yang hadir:

219.660 orang (71,88 %)

Orang yang menyatakan setuju:

199.510 orang (90,82 %)

Orang yang tidak setuju:

9.923 orang (4,51 %)

Orang yang tidak memberikan suara:

10.230 orang (4,65 %)

Dari hasil pemungutan suara itu maka terlihat 71,88% rakyat setuju Madura berdiri sebagai negara sendiri yang terpisah dari Negara Republik Indonesia. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, pihak Belanda banyak terlibat dengan cara melakukan berbagai tekanan dan menangkapi serta menahan orang yang tidak disukainya.

Dari hasil inilah maka pada tanggal 20 Februari 1948 secara resmi pemerintah Hindia Belanda melalui Letnan Gubernur

Jenderal van Mook mengakui dan merestui berdirinya Negara Madura. Sebagai Wali Negara ditunjuk Cakraningrat (Arsip Kementerian Penerangan No. 99 dikutip dari Seri penerbitan Naskah Sumber Arsip No.2. Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, 2002: 25-26).

Sementara itu pada tanggal 15 April 1948 telah diadakan juga pemilihan Dewan Perwakilan Negara Madura dan dalam bulan Desember 1948 dewan ini telah diadakan pelantikan di Pamekasan.

4. Sikap dan Reaksi Masyarakat Madura terhadap Pembentukan Negara Madura

Pada tanggal 2 November 1949 terbentuklah Negara Indonesia Serikat (RIS) sebagai konsekuensi dari hasil Konferensi Meja Bundar. Sebagai Presiden atau Kepala Negara yang pertama RIS adalah Sukarno, sedangkan Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Sementara yang diangkat sebagai anggota kabinet ternyata sebagian besar terdiri dari tokoh pendukung unitarisme dan hanya dua orang pendukung sistem federal yaitu Sultan Hamid II dan Anak Agung Gde Agung. Oleh karena itu di dalam kabinet kemudian muncul gerakan untuk membubarkan negara federal dan menggantinya dengan membentuk negara kesatuan semakin kuat. Kondisi yang demikian juga berdampak terhadap sikap penduduk yang ada di daerah-daerah yang menjadi negara bagian.

Reaksi dari rakyat Madura yang menolak berdirinya Negara Madura diwujudkan dalam bentuk berdirinya organisasi gerakan perjuangan hingga dalam bentuk aksi massa secara besar-

besaran. Salah satu organisasi yang sangat keras menolak berdirinya Negara Madura adalah Gerakan Perjuangan Madura. Organisasi yang berpusat di Pamekasan ini memiliki cabang diberbagai wilayah seperti Surakarta, Madiun, Nganjuk, Kediri, Blitar, Turen, Jombang, Babat, dan Tuban. Tujuan dari gerakan ini adalah menggerakkan rakyat Madura untuk memperjuangkan agar pulau Madura tetap dalam lingkungan NKRI.

Perjuangan untuk mempertahankan pulau Madura agar tetap berada di bawah NKRI ternyata juga bukan hanya dilakukan oleh penduduk Madura yang ada di pulau Madura saja, tetapi juga dilakukan oleh putra-putra Madura yang tinggal di wilayah lain. Pada tanggal 26 Februari 1948 putra-putra Madura yang ada di Jawa telah membentuk komite yang diberi nama Panitia Perjuangan Madura.

Selain dengan membentuk berbagai organisasi perjuangan, rakyat juga melakukan demonstrasi secara besar-besaran terutama ke gedung DPR. Massa demonstran terus mendesak agar dewan dibubarkan. Melihat reaksi para demonstran yang tidak dapat dibendung lagi maka dengan suara aklamasi sidang akhirnya mengambil keputusan menyetujui tuntutan rakyat untuk membubarkan dewan. Untuk pelaksanaan pembubaran Negara Madura, maka dibentuklah Panitia Pelaksana Resolusi DPR Madura yang beranggotakan wakil-wakil DPR Madura dan organisasi rakyat. Demonstrasi yang dilakukan berkali-kali secara besar-besaran ini akhirnya dapat memaksa Wali Negara Madura untuk meletakkan jabatan. Penyerahan jabatan Wali Negara ini kemudian diikuti dengan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Madura (Abdurachman, 1988:74).

5. Pembubaran Negara Madura untuk Kembali ke dalam NKRI

Pada tanggal 23 Februari 1950 Bupati Notohadikusumo melaporkan kepada Pemerintah RI di Yogyakarta mengenai situasi politik di Madura dan mendesak kepada pemerintah agar segera memberi keputusan bahwa Madura sudah masuk bergabung dengan wilayah RI kembali. Setelah menunggu beberapa hari ternyata keinginan itu belum mendapat balasan dari Pemerintah RI, maka pada tanggal 4 Maret 1950 beberapa orang wakil fraksi menemui Gubernur Jawa Timur, memohon Madura secara de facto diakui syah menjadi Daerah Karesidenan Madura sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur.

Rasa tidak puas terhadap pembentukan Negara Madura pada saat itu juga dilampiaskan oleh rakyat dengan cara memaksa para pejabat yang dirasa anti terhadap NKRI, seperti Asisten Wedono Pegantenan Ario Moh. Hanafi, Asisten Wedono Pakong, Moh Amin, dan Asisten Wedono Proppo Wongsodirejo untuk mundur dari jabatannya. Selain itu rakyat juga menuntut para pejabat pamong praja yang dirasa pengangkatannya berbau feodal dan masih ada hubungan keluarga dengan Wali Negara Cakraningrat. Tidak kurang dari 16 orang pejabat yang dipaksa turun dari jabatan pada saat ini, misalnya: Bupati Bangkalan Sis Cakraningrat (anak dari Cakraningrat), Sekretaris Umum Wali Negara Ruslan Cakraningrat (anak Cakraningrat), Abdul Rachman, Kepala Departemen Pemerintah, Polisi dan Keamanan (orang kepercayaan Cakraningrat), dan masih banyak pejabat-pejabat lainnya (Arsip Kabinet Perdana Menteri Jogjakarta No. 84 dikutip dari Seri Penerbitan Naskah Sumber Arsip no.2,

Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, 2002: 174-176).

Untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada tanggal 7 Maret 1950 Gubernur Jawa Timur Samadikun menunjuk R. Sunarto Hadiwijoyo sebagai Wakil Residen Madura. Tidak lama kemudian pada tanggal 19 Maret 1950 turunlah Surat Keputusan Presiden RIS yang isinya menetapkan daerah Madura sebagai Residen dari Republik Indonesia. Surat dari presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan diadakan serah terima kekuasaan di Madura dari pejabat sebelumnya yakni R.T.A. Notohadikusumo kepada pejabat baru R. Sunarto Hadiwijoyo. Dengan demikian maka mulai saat itu Madura telah diperintah oleh pejabat RI. Beliauulah pejabat Residen Madura yang pertama sesudah pendudukan Belanda berakhir (Abdurachman, 1988: 75-76).

Kesimpulan

1. Peranan pemerintah Belanda dalam pembentukan Negara Madura sangatlah besar, terutama melalui Letnan Gubernur Jenderal van Mook. Peranan itu mulai terlihat sejak dari awal pendirian yakni melalui pidato-

pidato van Mook mengenai potensi besar Madura terutama dalam bidang ekonomi dan budaya bilamana rakyat menyetujui berdirinya Negara Madura yang terlepas dari RI hingga tindakan-tindakan penekanan terhadap orang-orang yang pro Republik pada saat pemungutan suara.

2. Beban sejarah ketakutan terhadap Jawanisasi, merupakan salah satu penyebab para pemimpin lokal Madura lebih menerima ajakan Belanda untuk mendirikan negara sendiri dari pada memilih untuk bergabung ke dalam NKRI yang ada di Jawa. Dalam sejarahnya para penguasa Madura seringkali terjadi konflik dengan penguasa kerajaan yang ada di Jawa (khususnya Mataram), sementara dengan Belanda justru sering banyak bekerjasama misalnya dalam organisasi militer yang bernama Barisan Madura.
3. Kebencian rakyat Madura terhadap pembentukan Negara Madura yang terpisah dari NKRI selain diwujudkan dalam bentuk pembubaran negara tersebut, juga dilampiaskan dengan cara menurunkan secara paksa terhadap para pejabat yang dianggap pro Belanda dan anti NKRI.

Daftar Pustaka

- Abdurachman, *Sejarah Madura Selayang Pandang* (Sumenep: tp, 1971).
Agung, Ide Anak Agung Gde, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985).
Djafaar, Irza Arnyta, *Dari Moloku Kie Raha Hingga Negara Federal: Biografi Politik Sultan Ternate Iskandar Muhammad Djabir Sjah* (Yogyakarta: Bio Pustaka, 2005).

- Dekker, Nyoman, *Sejarah Revolusi Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980).
- Gonggong, Anhar, "Otonomi-Federasi Pascakemerdekaan: Kasus Indonesia," disampaikan pada Seminar Nasional Negara dalam Sejarah Indonesia. Jakarta 31 Agustus 1999.
- Kasdi, Aminuddin, *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa: Relasi Pusat-daerah pada periode akhir Mataram (1726-1745)* (Yogyakarta: Jendela, 2003).
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995).
- _____, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002).
- Rauf, Maswadi, "Negara Kesatuan" disampaikan dalam Seminar Nasional Negara dalam Sejarah Indonesia, Jakarta 31 Agustus 1999.
- Seri Penerbitan Naskah Sumber arsip No. 2, *Pembentukan Negara Madura Tahun 1948 dan Dampaknya terhadap Republik* (Surabaya: Badan Arsip Propinsi Jawa Timur, 2002).
- Wiryoprawiro, Zein, *Arsitektur Tradisional Madura Sumenep dengan pendekatan Historis dan Deskriptif* (Surabaya: ITS Surabaya, 1986).